

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Praktik merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu berarti akan terjadi tindakan. Faktor pendukung tersebut meliputi fasilitas dan faktor pendukung" (KBBI, 2024). Praktik adalah suatu sikap yang belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan nyata (overt behaviour). Agar sikap tersebut menjadi tindakan nyata, diperlukan faktor pendukung seperti fasilitas dan dukungan dari pihak lain (Notoatmodjo, 2010). Praktik tersebut tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, sehingga tercipta keamanan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Responsivitas atau *Responsive* adalah kemampuan pemerintah untuk menunjukkan bahwa program dan kegiatan selaras serta mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat, (Kurniawan, dalam Mahsyar, 2011).

Governance adalah serangkaian interaksi sosial dan politik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan publik, serta partisipasi pemerintah dalam mengatur kepentingan tersebut. (Koiman, 2009:273). Tata Kelola Responsif atau *Responsive Governance* mengacu pada kemampuan pemerintah untuk merespons dengan cepat, tepat, dan akurat terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Responsivitas berfokus pada kemampuan pemerintah untuk memberikan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan yang telah banyak diinginkan oleh Masyarakat.

Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) memegang peranan sentral sebagai unsur pelaksana di tingkat Polda yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda. Fokus utama instansi ini adalah mengelola hubungan kemitraan dengan masyarakat, yang diwujudkan melalui penguatan ketertiban umum, pembinaan sistem keamanan swakarsa (Siskamling), serta pengawasan terhadap satuan kepolisian khusus. Selain itu, direktorat ini berperan penting dalam

mengoptimalkan strategi pemolisian masyarakat dan meningkatkan kompetensi personel Bhabinkamtibmas di lapangan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan hanya fondasi bagi eksistensi suatu masyarakat, tetapi juga esensial dalam mewujudkan perubahan sosial yang positif, termasuk peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan martabat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mendefinisikan Kamtibmas sebagai kondisi dinamis masyarakat yang menjadi prasyarat pembangunan nasional yang melibatkan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan ketenteraman. Kondisi ini mencakup kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kemampuan untuk menghentikan dan menangani berbagai jenis pelanggaran hukum dan gangguan yang meresahkan

Keamanan masyarakat perlu untuk memahami terkait pembinaan Masyarakat. Pembinaan secara luas diartikan sebagai serangkaian upaya pengelolaan secara profesional terhadap seluruh komponen organisasi. Tujuannya adalah memastikan setiap komponen berfungsi dengan optimal, sehingga rencana yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien. Pembinaan masyarakat merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lembaga serta kapasitas sumber daya manusia dalam suatu komunitas. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai metode dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (Septiyani 2013:17)

Polda memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan undang-undang serta menjaga keamanan dan ketertiban, Ditbinmas atau Direktur Pembinaan Masyarakat, merupakan kepala Direktorat Pembinaan Masyarakat yang memiliki tanggung jawab kepada Kapolda serta berada di bawah koordinasi Wakapolda dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (Perpol No. 9 th 2021 ttg Polsus).

Ditbinmas memiliki tugas untuk melaksanakan binaan masyarakat, yang mencakup kegiatan Polisi Masyarakat (Polmas), menjaga ketertiban, dan mengatur, mengawasi, dan mendidik bentuk pengamanan swakarsa, Polisi Khusus (Polsus), dan upaya kerja sama lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polmas merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk melibatkan

masyarakat melalui kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan dan menentukan masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan sekitar serta mencari solusi untuk mengatasinya.

Di lingkup Provinsi Jawa Barat terutama di kota Bandung sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan tingginya angka kriminalitas. Kondisi ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga merusak citra dari pemerintah terutama Polda dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan keamanan pada masyarakatnya. Hal ini juga menjadi suatu *responsive* yang harus di prioritaskan oleh pihak pemerintah ataupun Polda dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk crime total dan crime rate berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2022 (jiwa)	<i>Crime Total</i>	<i>Crime Rate</i>
Kab. Bogor	5 556 308	2 244	40
Kab.Sukabumi	2 775 312	445	16
Kab.Cianjur	2 529 814	188	7
Kab.Bandung	23 756 086	1 554	41
Kab. Garut	2 648 952	692	26
Kab. Tasikmalaya	1 892 215	315	17
Kab. Ciamis	1 243 320	284	23
Kab. Kuningan	1 189 011	277	23
Kab. Cirebon	2 331 364	687	29
Kab. Majalengka	1 328 005	444	33
Kab. Sumedang	1 168 842	367	31
Kab. Indramayu	1 873 404	1 103	59
Kab. Subang	1 635 557	648	40
Kab. Purwakarta	1 023 176	1 086	106
Kab. Karawang	2 496 191	1 629	65
Kab. Bekasi	3 193 838	565	18

Kab. Pangandaran	428 596	44	10
Kab. Bandung barat	1 834 226	877	36
Kota Cimahi	528 646		
Kota Bogor	1 060 935	1 182	111
Kota Sukabumi	355 417	389	109
Kota Bandung	2 484 148	2 626	106
Kota Cirebon	338 942	640	189
Kota Bekasi	2 598 071	2 290	88
Kota Depok	2 113 618	2 160	102
Kota Tasikmalaya	732 484	392	54
Kota Banjar	205 139	156	76
Total	49 375 617	23 284	47

Sumber: Polres/Polresta di wilayah Provinsi Jawa Barat

Di Provinsi Jawa Barat sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan tingginya angka kriminalitas. Kondisi ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga merusak citra dari pemerintah terutama Polda dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan keamanan pada masyarakatnya. Hal ini juga menjadi suatu *responsive* yang harus di prioritaskan oleh pihak pemerintah ataupun Polda dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Tabel 1. 2 Data jumlah tindak pidana menurut jenis kriminalitas di Kota Bandung dari tahun 2022

KOTA BANDUNG	Jenis Kriminalitas	Jumlah Tindak Pidana	satuan	tahun
KOTA BANDUNG	CURANMOR R-2	209	KASUS	2022
KOTA BANDUNG	CURANMOR R-4	20	KASUS	2022
KOTA BANDUNG	CURI BERAT	223	KASUS	2022
KOTA BANDUNG	CURI KERAS	84	KASUS	2022
KOTA BANDUNG	CURI BIASA	154	KASUS	2022
KOTA BANDUNG	SENPI, HANDAK, SAJAM	36	KASUS	2022
KOTA BANDUNG	LAIN-LAIN KRIMINALITAAS	644	KASUS	2022

Sumber: Open Data Bandung

Pada tahun 2024, tercatat 335 kasus pencurian sepeda motor, yang menunjukkan penurunan sebesar 46% dibandingkan dengan 642 kasus pada tahun 2023 (Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Budi Sartono). Karena sedang maraknya masalah pada pencurian motor dan begal di Kota Bandung menjadi hal utama yang harus diwaspadai baik bagi Masyarakat maupun bagian kepolisian untuk menanggulangi masalah ini, salah satu program siskamling bisa diterapkan disetiap daerah setempat, sebagaimana untuk memperketat keamanan daerah dan dilakukan secara musyawarah mufakat oleh masyarakat pada masing-masing wilayah di setiap daerah. Upaya untuk mengurangi tindak kriminalitas yang ada di Kota Bandung program Siskamling bisa diterapkan di setiap daerah masing-masing dengan menjalin kemitraan dari pihak Bhabinkamtibmas dengan masyarakat.

Tabel 1. 3

Kejahatan Per TKP di Ranking Berdasarkan Jumlah Kejahatan 2025

NO	Kesatuan	Kejahatan	Selang Waktu Terjadi Kejahatan	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan	Ranking
1	Polrestabes Bandung	345	02. 09' 23"	15	I
2	Polres bogor	336	02. 12' 51"	6	II
3	Polresta bandung	235	03. 09' 57"	8	III
4	Polres cimahi	221	03. 21' 59"	10	IV
5	Polres karawang	189	03. 56' 11"	9	V
6	Polres indramayu	159	04. 40' 45"	9	VI
7	Polres subang	150	04. 57' 36"	10	VII
8	Polresta cirebon	126	05. 54' 17"	7	VIII
9	Polresta bogor Kota	125	05. 57' 07"	12	IX
10	Polres garut	122	06. 05' 54"	5	X
11	Polres tasikmalaya	115	06. 28' 10"	4	XI

	Kota				
12	Polres cianjur	115	06. 28' 10"	5	XII
13	Polres sukabumi	105	07. 05' 08"	4	XIII
14	Polres cirebon	93	08. 00' 00"	14	XIV
	Kota				
15	Polres sukabumi	80	09. 18' 00"	10	XV
	Kota				
16	Polres ciamis	74	10. 03' 14"	6	XVI
17	Polres	73	10. 11' 30"	8	XVII
	Purwakarta				
18	Polres	59	12. 36' 36"	5	XVIII
	Majalengka				
19	Polres sumedang	58	12. 49' 39"	5	XIX
20	Polres kuningan	46	16. 10' 26"	4	XX
21	Polres	28	26. 34' 17"	3	XXI
	Tasikmalaya				
22	Polres	26	28. 36' 55"	6	XXII
	Pangandaran				
23	Polres kota	12	62. 00' 00"	8	XXIII
	Banjar				
	Jumlah	2.892	00. 15' 26"	7	

Sumber : Polda Jawa Barat (Polmas), Tahun 2026

Merujuk pada Tabel Peringkat Tempat Kejadian Kejahatan Berdasarkan Jumlah Kejahatan pada tahun 2025 (Polda Jawa Barat, 2025), dapat disimpulkan bahwa tingkat kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat tidak merata di seluruh unit regional. Data menunjukkan bahwa aktivitas kriminal sebagian besar terkonsentrasi di pusat-pusat kota dan wilayah yang bercirikan kepadatan penduduk tinggi dan interaksi sosial-ekonomi yang intens. Kepolisian Kota Bandung muncul sebagai wilayah dengan insiden kejahatan tertinggi, mencatat 345 kasus, dengan

interval waktu yang singkat antar kejadian dan risiko terbesar warga menjadi korban kejahatan (Polrestabes Bandung, 2025). Situasi ini mencerminkan kerentanan wilayah metropolitan terhadap aktivitas kriminal yang sering dan berulang.

Demikian pula, Kepolisian Bogor, Kepolisian Kota Bandung, dan Kepolisian Cimahi juga menempati peringkat atas, menunjukkan pola yang serupa dengan peningkatan frekuensi kejahatan dalam periode waktu yang relatif singkat (Polda Jawa Barat, 2025). Sebaliknya, wilayah yang berada di peringkat menengah, termasuk Karawang, Indramayu, dan Subang, terus mengalami tingkat aktivitas kriminal yang moderat, meskipun tidak seintens yang diamati di wilayah perkotaan besar. Sebaliknya, wilayah hukum dengan peringkat terendah, seperti Kota Banjar dan Pangandaran, melaporkan lebih sedikit insiden kriminal dan interval yang lebih lama antar kejadian, menunjukkan tingkat kerentanan kejahatan yang relatif lebih rendah. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa masalah kriminalitas di Jawa Barat tidak merata secara spasial, sehingga memerlukan strategi keamanan yang responsif dan berbasis bukti yang disesuaikan dengan kondisi regional, khususnya melalui penguatan mekanisme keamanan berbasis masyarakat di daerah berisiko tinggi (Wahyurudhanto, 2018).

Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik, serta memberikan edukasi tentang keamanan (Wahyurudhanto, 2018). Salah satu program yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan adalah Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman (Perpol No. 1 Tahun 2021). Melalui Siskamling, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman kejahatan, serta mempererat kerja sama antar warga. Program Siskamling menjadi contoh konkret dari *responsive governance* keamanan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif warga dan *stakeholders* dalam menjaga keamanan lingkungan mereka (Hood dan Margetts, 2004).

Menurut Bima selaku Wakil Menteri Dalam Negeri saat peninjauan kegiatan Siskamling di Kota Bandung, Presiden secara tegas menginstruksikan agar kepala daerah mengaktifkan kembali tradisi Siskamling (Wakil Mendagri Bima, 2025).

Siskamling bukan hanya sekadar kegiatan ronda malam, melainkan juga sebagai upaya untuk mempererat hubungan sosial antarwarga. Bima menegaskan bahwa tujuan sistem ini bukan untuk membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan aspirasi, melainkan untuk menjaga keamanan lingkungan dari segala bentuk provokasi dan gangguan yang dapat menimbulkan keresahan. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menerbitkan Surat Edaran yang memerintahkan pengaktifan Siskamling dan pos ronda tingkat RT/RW, serta meminta jajaran pejabat eselon I Kemendagri untuk memantau pelaksanaannya di berbagai daerah (Surat Edaran Mendagri, 2025).

Pada periode tahun 2024-2025 Polda Jawa Barat bagian Ditbinmas mengadakan lomba Satkamling/siskamling di tiap wilayah masing-masing se Jawa Barat.

Tabel 1. 4
Juara Lomba Satkamling Tingkat Polda Jabar Tahun 2024

Peringkat	Pos Satkamling	RT/ RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Polres	Polda
Juara I	Wiralodra Presisi Ragem	08/04	Kel.Tegalurung	Balongan	Indramayu	Polres Indramayu	Polda Jabar
Juara II	Pos Satkamling	27/07	Desa Jabong	Padagen	Subang	Polres Subang	Polda Jabar
Juara III	Pos Satkamling	08/02	Kel.Cibereum	Banjar	Kota Banjar	Polres Banjar	Polda Jabar
Harapan I	Graha Taman Sukabumi	05/07	Kel.Kramat	Gunung Puyuh	Kota Sukabumi	Polres Sukabumi Kota	Polda Jabar
Harapan II	Bobojong (Dusun Cikembang)	011/017	Desa Selamanik	Cipaku	Ciamis	Polres Ciamis	Polda Jabar
Harapan III	Sanggar Indah Banjaran	RW 06	-	Cangkuang	Bandung	Polresta Bandung	Polda Jabar

Sumber: Polda Jawa Barat (Ditbinmas), Tahun 2024-2025

Berdasarkan tabel di atas, program lomba kejuaraan Satkamling yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Barat dimenangkan oleh Polres Indramayu sesuai dengan klasifikasi kejuaraan yang telah ditetapkan. Penilaian lomba tersebut dilakukan berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ditentukan oleh Polda Jawa Barat sebagai acuan bagi seluruh Polres di lingkungan wilayah hukumnya. Keberhasilan Polres Indramayu dalam meraih kejuaraan ini mencerminkan tingkat

pembinaan dan pengelolaan Satkamling yang dinilai paling optimal dibandingkan Polres lainnya dalam periode perlombaan tersebut. Penyelenggaraan lomba kejuaraan Satkamling ini merupakan salah satu bentuk inovasi dan upaya Ditbinmas Polda Jawa Barat dalam mendorong semangat kompetitif yang positif antarwilayah guna meningkatkan kualitas keamanan berbasis masyarakat secara merata. Melalui program ini, setiap Polres didorong untuk terus memperkuat pembinaan Satkamling di wilayahnya masing-masing sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dapat terus ditingkatkan. Dengan adanya penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik, diharapkan program Satkamling tidak hanya berjalan secara rutinitas semata, tetapi juga berkembang menjadi gerakan keamanan berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Tabel 1. 5 Juara Lomba Satkamling Tingkat Polda Jabar Tahun 2025

Peringkat	Pos Satkamling	RT/ RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Polres
Juara I	Jl.Istiqomah	02/08	Kel. Lemahmekar	Indramyu	Polres Indramyu
Juara II	Kp.Babakan	RW 03	Kel.Muktisari	Langensari	Polres Banjar
Juara III	Sanggar Indah Banjaran	09/06	-	Cangkuang	Polresta Bandung
Harapan I	Pos Satkamling RW 05	RW 05	Kel.Cihargeulis	Cibeunying Kaler	Polrestabes Bandung
Harapan II	Sukajaya	08/02	Kel.Dangdeur	-	Polres Subang
Harapan III	Desa Sukamanah	06/01	Desa Sukamanah	Cisaat	Polres Sukabumi Kota

Sumber: Polda Jawa Barat (Ditbinmas), Tahun 2024-2025

Pada periode selanjutnya di 2025 lomba satkamling ini dimenangkan lagi oleh polres Indramayu yang berhasil mempertahankan kemenangan pada periode sebelumnya. Dalam perlombaan Satkamling yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, pemilihan pemenang di tingkat Polres umumnya ditentukan melalui serangkaian kriteria penilaian yang mewakili efektivitas inisiatif keamanan lingkungan berbasis masyarakat. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek,

termasuk pengaturan administratif dan manajerial Satkamling seperti struktur organisasi, penjadwalan patroli, dan dokumentasi kegiatan; tingkat keterlibatan masyarakat dan kemandirian dalam melaksanakan tugas patroli; ketersediaan dan kondisi fasilitas dan infrastruktur pendukung; konsistensi pelaksanaan patroli malam dan upaya pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum; penerapan inovasi dan nilai-nilai lokal dalam sistem keamanan; serta dampak nyata dalam menjaga lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

Kriteria-kriteria ini dinilai secara kolektif dan menyeluruh untuk dijadikan dasar dalam menentukan unit Satkamling terbaik di tingkat Polres di seluruh Jawa Barat oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dengan adanya lomba satkamling ini bisa membuat keamanan menjadi lebih terinci dalam lingkup perwilayah dan fokus pada hal-hal yang mungkin tidak terkelilingi jika tidak melalui satkamling ini dan juga bisa berfokus pada masyarakatnya langsung yang ikut turun berpartisipasi bersama aparat yang bertugas dalam satkamling ini. Satkamling ini juga merupakan sebuah program yang menyatukan keamanan secara langsung dengan partisipasi banyak pihak baik dari pihak polda sebagai pengontrol dan pengevaluasi kepada setiap polres daerah dan bhabinkamtibmas sebagai actor yang turun langsung bersama para masyarakat untuk menjalankan program satkamling ini.

Adapun *research gap* atau celah pengetahuan yang ditemukan dalam penelitian ini merujuk pada keterbatasan yang terdapat pada studi-studi sebelumnya, di mana kajian yang ada masih terfokus secara sempit pada program Siskamling saja tanpa menelaah lebih jauh bagaimana tata kelola yang responsif dijalankan secara menyeluruh oleh institusi yang bertanggung jawab di baliknya. Penelitian-penelitian terdahulu belum secara komprehensif menjelaskan maupun memberikan gambaran yang utuh mengenai bentuk *responsive governance* yang sesungguhnya diterapkan oleh Ditbinmas Polda Jawa Barat dalam berinteraksi dan merespons kebutuhan masyarakat. Akibatnya, pemahaman yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana institusi ini menjalankan fungsinya sebagai fasilitator keamanan berbasis masyarakat yang responsif.

Selain itu, studi-studi sebelumnya juga belum membahas secara mendalam mengenai dampak nyata dari responsivitas Ditbinmas terhadap perubahan positif

yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam hal meningkatnya rasa aman, berkurangnya angka kriminalitas, maupun tumbuhnya kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban lingkungan. Faktor-faktor eksternal yang turut memengaruhi efektivitas program keamanan berbasis masyarakat, seperti kondisi lingkungan sosial, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat, serta aksesibilitas fasilitas keamanan yang tersedia di setiap wilayah, juga luput dari kajian yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara lebih komprehensif bagaimana praktik *responsive governance* Ditbinmas Polda Jawa Barat dijalankan melalui keempat dimensinya, sekaligus menelaah faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mewujudkan keamanan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Topik ini bisa menjadi acuan baik untuk *Government* ataupun *stakeholders* yang memiliki kebutuhan yang sesuai dengan topik ini. Penelitian ini dirasa perlu dijalani karena urgensinya adalah Tata kelola pemerintahan membutuhkan partisipasi masyarakat karena publik merasa pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka, yang menciptakan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam tata kelola publik dan landasan tata kelola yang Baik dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti ingin mengangkat judul penelitian tersebut. "**Praktik *Responsive Governance* Ditbinmas Polda Jabar Dalam Keamanan Berbasis Masyarakat**". Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang lebih detail dan fokus terutama pada program siskamling yang menjadi salah satu hasil dari *responsive governance* dari pihak Ditbinmas Polda Jabar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dari dimensi *responsive governance* secara *responsiveness* diterapkan oleh Ditbinmas ?
2. Bagaimana praktik dari dimensi *responsive governance* secara *partnership* diterapkan oleh Ditbinmas ?
3. Bagaimana praktik dari dimensi *responsive governance* secara *innovation* diterapkan oleh Ditbinmas ?
4. Bagaimana praktik dari dimensi *responsive governance* secara *evaluation* diterapkan oleh Ditbinmas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang penulis tetapkan sebagai tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik dari dimensi *responsive governance* secara *responsiveness* diterapkan oleh Ditbinmas
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik dari dimensi *responsive governance* secara *partnership* diterapkan oleh Ditbinmas
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik dari dimensi *responsive governance* secara *innovation* diterapkan oleh Ditbinmas
4. Untuk mengetahui bagaimana praktik dari dimensi *responsive governance* secara *evaluation* diterapkan oleh Ditbinmas

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dari segi ilmiah (signifikansi akademik) maupun dari segi sosial (signifikansi praktis) sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah (Signifikansi Akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan akademik terkait tata kelola pemerintahan, khususnya pada bagian ditbinmas Polda Jabar. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang yang membahas terkait topik yang sama dengan penelitian ini, juga memberikan perspektif baru dalam penulisan.

2. Kegunaan Sosial (Signifikansi Praktis)

Dari sisi praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah membuat keputusan tentang cara memberikan keamanan yang lebih dekat. Penelitian ini juga membantu masyarakat umum dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya berkecimpung langsung dengan program yang sudah ada dalam menjaga keamanan.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang dengan mengintegrasikan pada teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan Konsep dasar Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (1988), sebagaimana dijelaskan oleh Sellang (2016:42), menegaskan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu sistem yang kompleks. Sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari serangkaian proses yang saling berhubungan serta dipengaruhi oleh berbagai aktor, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.

Kompleksitas ini muncul karena Administrasi Publik berperan sebagai penghubung antara kebijakan publik yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan dan implementasinya di lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai suatu sistem, Administrasi Publik membutuhkan koordinasi yang efektif, komunikasi yang jelas, serta akuntabilitas yang tinggi. Proses-proses seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi menjadi bagian penting dalam sistem ini. Keberhasilan Administrasi Publik dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor yang terlibat, mulai dari pejabat pemerintah hingga masyarakat sipil, untuk bekerja sama secara harmonis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem yang kompleks ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif.

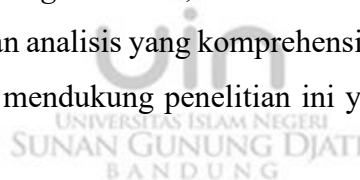
Pada Tingkat *grand teori*, penelitian ini menggunakan dasar *good governance* Pemerintah harus menyediakan aturan dan kebijakan, bisnis menggerakkan perekonomian, dan masyarakat umum melakukan aktivitas swadaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan transparansi. (Bob Sugeng Hadiwinata, 2009:131).

Di Tingkat *Middle teori*, teori *responsive governance* yang dikemukakan oleh (Hood dan Margetts, 2004), kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan

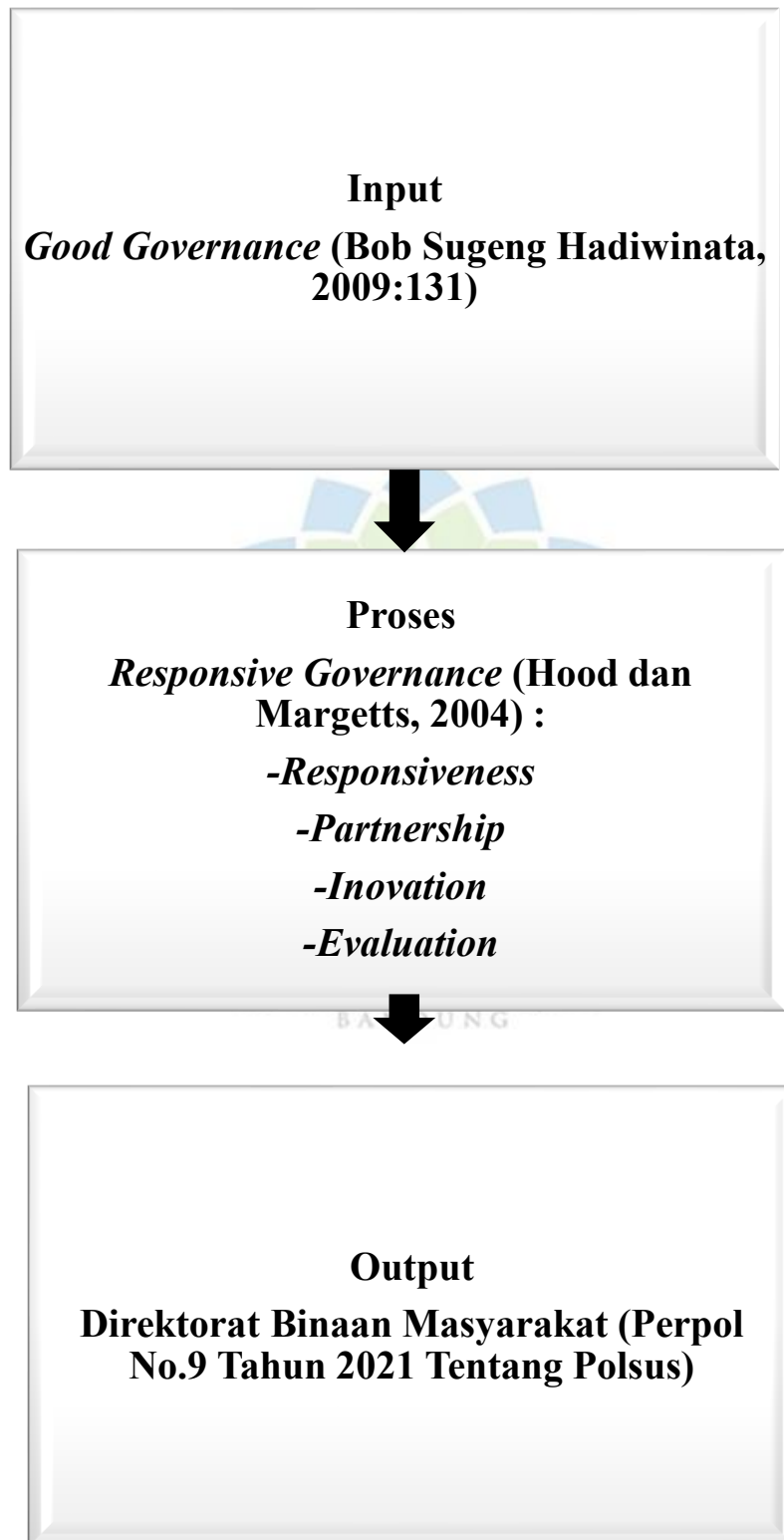
masyarakat. Responsivitas ini dapat diukur dari sejauh mana pemerintah dapat mengembangkan program dan aktivitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa respon dari pemerintah sebagai bukti pada Masyarakat bahwa tata Kelola mereka sudah memadai untuk masyarakat.

Pada *applied teori*, menerapkan tupoksi dari Direktorat Binaan Masyarakat (Ditbinmas) memegang peranan krusial dalam pembinaan anggota Polsus di tingkat Polda. Ditbinmas tidak hanya menjadi koordinator dan pengawas bagi para anggota Polsus, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam peningkatan kemampuan teknis mereka. Dalam *middle teori* dan *applied teori* menghubungkan terkait peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbimkamtibmas) dengan, Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015 mengamanatkan tiga tugas utama bagi Bhabinkamtibmas. Dengan menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan amanat Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka adalah jembatan antara Polisi dan masyarakat, serta penggerak terciptanya lingkungan yang kondusif.

Dengan mengintegrasikan *grand teori*, *middle teori* dan *applied teori* penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam. Munculah kerangka pemikiran untuk mendukung penelitian ini yang diolah menjadi sebuah bagan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : (diolah peneliti, 2026)